

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini telah membawa dampak terhadap melemahnya pondasi ekonomi nasional. Kondisi ini berimbas pada menurunnya produktivitas dunia usaha, rendahnya peluang kerja dan usaha, membengkaknya angka pengangguran, serta menurunnya tingkat pendapatan (*income perkapita*) masyarakat. Kondisi ini telah mengakibatkan bertambahnya jumlah keluarga miskin yang tersebar diberbagai wilayah. Kemiskinan menjadi ancaman bagi keluarga tertentu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sekalipun karena tidak memiliki penghasilan yang memadai.

Kemiskinan berkaitan dengan kebutuhan dasar, status sosial dan kelangsungan hidup yang tidak terjamin, seperti menyangkut soal kebutuhan dasar dan sekaligus status sosial, baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Persoalan kemiskinan juga menyangkut kelangsungan kehidupan. Keterbatasan kemampuan untuk memiliki kebutuhan pokok dan fasilitas penunjang kehidupan lainnya, menunjukkan keterbatasan dalam mempertahankan kelangsungan kehidupannya.

Peningkatan jumlah warga miskin membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap kegiatan pembangunan karena kondisi sosial masyarakat yang tidak mendukung. Oleh karena itu, perhatian pemerintah saat ini dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan pendekatan kelompok karena dianggap lebih mungkin menjangkau jumlah masyarakat miskin diberbagai tempat

dibanding penanganan secara orang perorang yang tidak mungkin mampu menyentuh seluruh masyarakat miskin.

Pembangunan ekonomi nasional dewasa ini diarahkan dalam membangun kemampuan ekonomi masyarakat, melalui peningkatan kemandirian, keterampilan dan wirausaha yang secara langsung berpengaruh pada perbaikan ekonomi, pendapatan maupun kesejahteraan keluarga.

Perhatian yang diberikan kepada masyarakat miskin dan golongan ekonomi lemah ini menjadi semakin penting, karena cara tersebut diyakini sebagai salah satu cara menormalkan kembali sistem ekonomi nasional yang selama ini dipandang rapuh, sekaligus menghindari kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat dengan memberdayakan usaha-usaha di sektor informal, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi walaupun diakui telah berhasil mendorong peningkatan, kemampuan dan kesejahteraan sebagian masyarakat, tetapi disisi lain seperti yang dijelaskan didepan, telah meninggalkan kemiskinan bagi sebagian masyarakat. Dengan kata lain masyarakat belum seluruhnya dapat terangkat kehidupannya melalui pembangunan yang dilaksanakan selama ini. Keadaan ini diperparah oleh terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, dimana bertambahnya jumlah masyarakat miskin, baik karena semakin terbatasnya kesempatan kerja dan semakin sulitnya kesempatan berusaha maupun disebabkan oleh baasis ekonomi yang melibatkan partisipasi rakyat kurang terbangun secara baik.

Langkah yang harus diprioritaskan dalam mengatasi kondisi tersebut yaitu dengan mendorong usaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk dapat mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan dan memperkuat kemampuan ekonomi sebagai pondasi ekonomi nasional. Disamping itu, pemberdayaan keluarga dalam mendapatkan kesempatan bekerja dan berusaha dalam meningkatkan pendapatan. Usaha-usaha kecil yang ada dan dikembangkan masyarakat, umumnya merupakan usaha keluarga yang meliputi pedagang-pedagang eceran, industri rumah tangga, dan usaha-usaha kecil sejenisnya, sebagaimana dikemukakan Suparman Sumahawijaya (1997:97), yaitu :

Adanya usaha kecil sangat memajukan perputaran roda ekonomi dan sangat menunjang pembangunan ekonomi setiap bangsa. Karena banyaknya masalah pengangguran akan diserap oleh kegiatan kecil-kecilan yang selanjutnya meningkat menjadi kegiatan pengusaha kecil. Kegiatan-kegiatan ini meliputi pedagang-pedagang eceran, produksi jasa, pertanian maupun kegiatan industri secara kecil-kecilan sampai dengan menengah.

Pemberdayaan keluarga miskin dilakukan melalui pengembangan usaha kecil yang umumnya berbasis dirumah tangga dan melibatkan potensi keluarga. Dalam menjalin kelangsungan dan kemajuan usaha-usaha dimaksud diperlukan perhatian memadai dari pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha, baik perhatian dilakukan secara sendiri-sendir maupun dalam kerangka kerjasama diarahkan untuk membantu ekonomi keluarga dipandang tidak mampu dalam membiayai berbagai kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan pokok.

Komitmen pemerintah dalam menangani golongan ekonomi lemah ataupun keluarga miskin ditandai oleh bergulirnya berbagai program pengentasan kemiskinan. Adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibentuk

di setiap Desa juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan, karena LPM dibentuk untuk membantu warga masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dalam berbagai bidang khususnya peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan observasi awal bahwa keberadaan LPM di desa Ambara belum mampu berperan dalam menangani permasalahan-permasalahan pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan warga masyarakat. Kondisi sosial ekonomi yang kurang menggairahkan di masyarakat berpengaruh pada tingkat pendapatan dan kemampuan ekonomi warga masyarakat itu sendiri. Program-program LPM di desa Ambara berjalan sekitar 60% dari target yang dicapai seperti penyalahgunaan dana bantuan berupa Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif sehingga modal tersebut tidak berkembang dan tidak bisa digulirkan pada kelompok-kelompok lain. LPM di desa Ambara juga belum memiliki kewajiban dalam mengembangkan potensi maupun sumber-sumber yang dimiliki warga masyarakat baik secara mandiri maupun dalam mendukung program-program pengentasan kemiskinan maupun perbaikan ekonomi yang digulirkan pemerintah.

Seharusnya, perhatian yang diberikan LPM kepada keluarga miskin tidak hanya menyalurkan atau menyediakan modal usaha tetapi harus disertai oleh langkah-langkah pembinaan agar usaha-usaha yang dibangun dapat lebih berhasil dan mampu menopang kebutuhan hidup keluarga. Untuk mengetahui apa saja kegiatan LPM dalam memberikan pembinaan masyarakat peneliti dalam penelitian ini memilih masalah studi tentang program kegiatan lembaga

pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Ambara Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana program kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Ambara Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan program kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Ambara Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang berarti, khususnya dalam :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan dan pengalaman penulis tentang kegiatan LPM dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin yang merupakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah, baik yang menyangkut pendekatan yang digunakan, hambatan-hambatan dalam kegiatan, maupun hasil yang dicapai dalam program tersebut.
2. Sebagai masukan bagi praktisi sosial maupun instansi yang terkait dengan upaya Pemberdayaan Masyarakat maupun bagi LPM itu

sendiri dalam menangani dan memberdayakan keluarga miskin dalam mendorong efektifnya program pengentasan kemiskinan di pedesaan.

3. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dalam aspek pembangunan masyarakat dan kependudukan, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan pendapatan dan kewirausahaan golongan ekonomi keluarga, peningkatan pendapatan dan kewirausahaan golongan ekonomi lemah, usaha kecil dan keluarga miskin.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis laporan penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian tentang program kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).